

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya berbagai bentuk lembaga pendidikan di tengah-tengah masyarakat dewasa ini, tampaknya masih belum sebanding dengan nilai-nilai pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari fenomena dan realitas masyarakat yang masih adanya praktek-praktek manipulasi terhadap hukum, kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Begitu juga dengan gesekan-gesekan sosial seperti tawuran antar warga dan tawuran antar pelajar yang *notabene* sebagai kaum intelektual juga kerap menjadi *head line* pemberitaan di berbagai media cetak maupun media elektronika.

Tipologi masyarakat Indonesia yang dulu terkenal ramah, santun, tanggung jawab, menghormati keheterogenan adat dan budaya seakan sirna ketika anak-anak bangsa itu berubah menjadi beringas, emosional, dan tidak segan-segan membunuh, merampok dan memperkosa hak sesama saudaranya sendiri.

Terhadap krisis sosial yang kerap terjadi di sebagian besar masyarakat kota dan desa tersebut, para pakar pendidikan maupun sosial, antara lain diwakili Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi (2004:227) menyatakan bahwa krisis multidimensi yang berkepanjangan ini, adalah akibat dari gagalnya sistem pendidikan nasional di Indonesia. Dari kenyataan itulah sehingga terilhami lahirnya suatu gerakan reformasi sebagai gerakan pembaharuan untuk mengembalikan kondisi bangsa Indonesia agar bangkit kembali dari keterpurukan baik ekonomi, politik maupun sosial budaya.

Beralihnya kekuasaan dari orde baru ke orde reformasi, adalah salah satu dampak yang cukup signifikan dari paradigma berpikir masyarakat yang cenderung lebih terbuka. Sikap kritis masyarakat dalam menyikapi berbagai ketimpangan sosial yang terjadi pasca Orde Baru adalah salah satu bentuk dari tuntutan atas keterbukaan itu. Berkaitan dengan hal ini, Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah (2004:58) mengemukakan bahwa, bukti dari sikap kritis dan keterbukaan tersebut adalah keinginan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan demokrasi di berbagai bidang, ditambah lagi dengan kecenderungan yang kuat terhadap terwujudnya sistem masyarakat madani (*civil society*). Konon tuntutan masyarakat atas terwujudnya sistem masyarakat madani ini telah menggejala di berbagai kalangan masyarakat bahkan sudah tumbuh kemauan keras untuk berbicara tentang masyarakat tersebut (Nurcholish Madjid, 2000:316).

Keterkaitan antara tuntutan masyarakat atas terwujudnya masyarakat madani dengan tujuan pendidikan nasional, Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi (2004:12) menyatakan bahwa pendidikan diharapkan mampu menciptakan, memunculkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu dengan harapan benar-benar memiliki otonomi sejati dan menemukan jati dirinya serta dapat melakukan proses-proses kemanusiaan.

Di dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* pada Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah:

“...untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Jika semua lembaga pendidikan di Indonesia berpedoman kepada landasan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, (2004:233) memprediksi bahwa tujuan pendidikan nasional tersebut berkaitan dengan pentahapan kegiatan sebagai berikut:

Pertama, kehidupan individu yang meliputi agama, hak, tingkah laku, aktivitas dan pencapaiannya, pertumbuhan yang diinginkan oleh pribadinya, dan persiapan kehidupan dunia akherat. *Kedua*, kehidupan sosial yang meliputi hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara menyeluruh dan *ketiga*, kehidupan profesional yang meliputi pendidikan, pengetahuan dan keterampilan, kemandirian, kreativitas, kewirausahaan dan kecakapan.

Atas dasar pentahapan kegiatan tersebut, maka pendidikan merupakan faktor penting dalam proses perkembangan intelektualitas, moralitas, mentalitas dan spiritualitas individu maupun sosial. Proses pendidikan bersifat universal dan global yaitu adanya pemanusiaan manusia yang mampu menampilkan karakter kemanusiaannya yaitu perpaduan antara akal dan hati yang dibingkai oleh norma agama dan norma sosial. Sehingga akan terwujudlah tatanan masyarakat yang dicita-citakan sesuai dengan karakter dan budaya bangsa yaitu sebuah sistem dan tatanan pemerintahan negara Indonesia yang tidak lagi bersifat otoriter, tetapi menekankan kepada sistem yang lebih bersifat egaliter yang menjadi visi reformasi sekaligus menjadi visi pendidikan nasional.

Dari deskripsi di atas, penulis akan mengkaji tentang implementasi tujuan pendidikan nasional dalam pembentukan masyarakat madani.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah penelitian skripsi ini, penulis membagi ke dalam tiga bagian, yaitu :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian skripsi ini adalah berkaitan dengan wilayah kajian *Sosiologi Pendidikan*.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan studi pustaka yaitu mengkaji tentang implementasi tujuan pendidikan nasional dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia .

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang dikaji penulis dalam penelitian skripsi ini adalah tentang sejauhmana implementasi tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada Bab II pasal 3 UUSPN tahun 2003 terhadap upaya mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.

2. Pembatasan Masalah

Masalah yang dikaji penulis dalam skripsi ini menitikberatkan pada tujuan pendidikan nasional dalam membangun masyarakat madani, yaitu masyarakat yang bukan hanya memiliki karakter intelektual *an sich* melainkan masyarakat yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai intelektualitasnya disertai nilai-nilai mental spiritual yang tinggi, sehingga akan tercipta masyarakat yang menjunjung tinggi

nilai-nilai moral, etika, dan norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan atas permasalahan tersebut di atas, maka yang akan menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, penulis merumuskannya ke dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional dalam upaya membentuk masyarakat madani?,
- b. Bagaimana strategi pendidikan nasional untuk menuju masyarakat madani?,
- c. Apa harapan diundangkannya Sisdiknas Tahun 2003 dalam membentuk masyarakat madani?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penulisan skripsi adalah untuk mengetahui data tentang:

1. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional dalam upaya membentuk masyarakat madani,
2. Strategi pendidikan nasional untuk menuju masyarakat madani,
3. Harapan diundangkannya Sisdiknas Tahun 2003 dalam membentuk masyarakat madani.

D. Kerangka Pemikiran

Tatanan suatu masyarakat yang baik sangat ditentukan oleh peran serta, hak, kewajiban dan fungsi para anggota masyarakat tersebut. Karena itu, apapun yang

terjadi dan berlaku di masyarakat, sangat bergantung pada setiap individu sebagai penentu dan pelaksana tatanan masyarakat itu sendiri. Pernyataan ini merupakan cerminan dari firman Allah SWT dalam Al-quran surat Al-Rad/13:11 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ (الرعد: ١١)

Artinya, "... sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ...". (Hasbi Ashshiddiqi, dkk, 1989:370).

Juga tercantum dalam Al-quran Surat Al-Isra/17:36 yang berbunyi :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (الاسراء : ٣٦)

Artinya, "Janganlah kamu mengikuti hal-hal yang kamu tidak mengetahuinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan akal budi, masing-masingnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan" (Hasbi Ashshiddiqi, dkk, 1989:429)

Melalui kedua ayat di atas, ajaran Islam telah memberikan petunjuk yang jelas kepada umat manusia agar terus menerus melakukan upaya pembaharuan dan pencerahan. Manusia sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dituntut untuk dinamis dan konstruktif dalam melakukan perubahan-perubahan.

Kuntowijoyo yang pendapatnya dikutip Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (2001:42) mengatakan bahwa, ada tiga tahapan perubahan masyarakat yaitu *pertama*, tahap masyarakat ganda, yakni ketika terpaksa ada pemilahan antara masyarakat

madani (*civil society*) dengan masyarakat politik (*political society*) atau antara masyarakat dan negara. *Kedua* tahap masyarakat tunggal yaitu ketika masyarakat madani sudah berhasil dibangun. *Ketiga*, tahap masyarakat etis (*ethical society*) yang merupakan tahap akhir dari perkembangan tersebut. Untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik itu, E. Mulyasa (2002:4) menegaskan perlu adanya perubahan sosial yang memberi arah bahwa pendidikan merupakan pendekatan dasar dalam proses perubahan tersebut.

Begitu pentingnya pendidikan dalam membentuk generasi bangsa yang akan melanjutkan *estafeta* pembangunan ke arah yang lebih maju, maka salah satu upayanya adalah menghilangkan keterbelakangan melalui pendidikan (Hasan Langgulung, 1995:261). Pendapat ini dilengkapi Jalaludin dan Abdullah Idi (1997:115) yang mengutip pendapat Plato bahwa kebobrokan suatu masyarakat tidak dapat diperbaiki dengan cara apapun kecuali dengan pendidikan. Pendidikan akan sangat besar artinya bagi pertumbuhan bangsa dan negara (Kartini Kartono, 1997:115). Hal ini juga dikatakan oleh Aulia Reza Bastian (2002:3) bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat strategis, untuk mencapai kemajuan-kemajuan kehidupan suatu masyarakat dan bangsa.

Seorang tokoh dan pakar pendidikan nasional H.A.R Tilaar (2002:19-20) menyatakan bahwa:

Terwujudnya nilai-nilai Indonesia baru, akan dapat diwujudkan antara lain melalui suatu redefinisi dan refosisi penyelenggaraan pendidikan nasional. Lahirnya masyarakat Indonesia baru dengan nilai-nilai yang baru, begitu pula untuk menata kembali nilai-nilai sebagai ekses dari *euforia* demokrasi pasca orde baru diperlukan suatu peninjauan kembali dan penataan kembali penyelenggaraan pendidikan nasional berdasarkan paradigma baru.

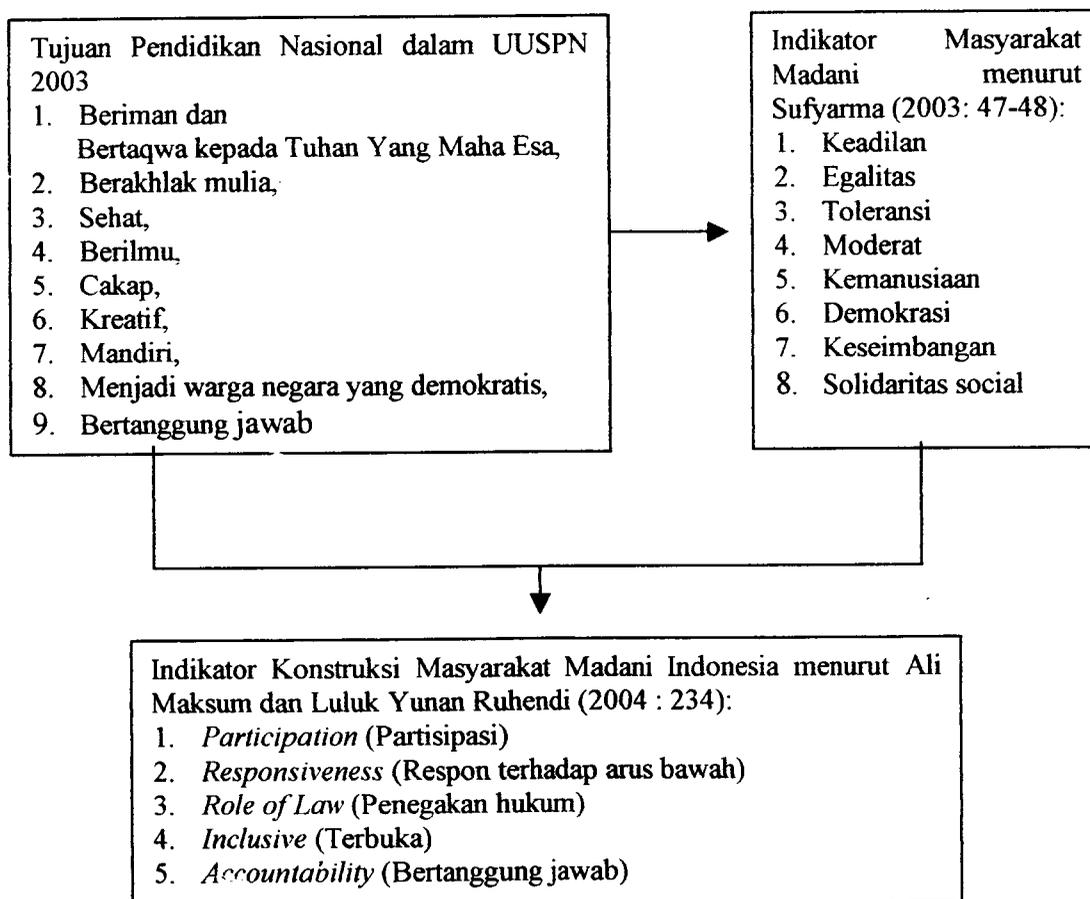
Dari beberapa pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa, pendidikan sangat menentukan peradaban suatu bangsa. Karenanya, pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting, dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi pada bangsa. Pendidikan dapat dijadikan sebagai wahana menuju masyarakat Indonesia baru atau diistilahkan dengan masyarakat madani .

Masyarakat madani menurut Mastuhu (2004:138) adalah suatu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi demokrasi, transparan (terbuka), jujur dan adil. Sedangkan Sufyarma (2003:47) mengatakan bahwa, istilah masyarakat madani mengacu kepada konsep *civil society* dan konsep negara kota *Madinah Al Mukaramah* yang dibangun Nabiallah Muhammad saw pada tahun 622 M. Masyarakat madani juga mengacu kepada konsep yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun dan konsep *Al madinah Al Fadhilah* (negara utama) yang dikemukakan oleh filsuf Al-Farabi. Cendekiawan muslim yang juga Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Azyumardi Azra (1999:7) mengemukakan bahwa, masyarakat madani adalah masyarakat yang mengacu kepada kehidupan masyarakat yang berkualitas dan bertamaddun (*civility*). Bahkan Nurcholish Madjid (2000:323) secara lebih rinci menggambarkan bahwa, masyarakat madani memiliki ciri-ciri *egalitarianisme*, penghargaan kepada manusia berdasarkan *prestasi*, keterbukaan, partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan umum, bukan berdasarkan keturunan.

Dalam kerangka upaya perwujudan suatu tatanan masyarakat sebagaimana dikemukakan beberapa pakar tersebut di atas, maka dalam kontek ketatanegaraan di Indonesia aktualisasi masyarakat madani dapat dilihat dari sejauhmana penguasa

menjalankan system pemerintahannya berpegang kepada prinsip pemerintahan yang bersih (*good governance*), yaitu pemerintahan yang dalam memutuskan kebijakannya mengikutsertakan masyarakat (*participation*), tanggap terhadap arus bawah (*responsiveness*), bertumpu kepada ajaran (*role of law*), terbuka terhadap keragaman anggotanya (*inclusive*), bertanggung jawab (*accountability*), efektif, efisien, bersih, dan transparan (Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, 2004 : 234).

Agar tidak terjadi pemahaman yang bias terhadap masalah dalam skripsi ini, maka penulis menyederhanakannya ke dalam bagan di bawah ini :



Dari bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam menentukan maju mundurnya suatu bangsa,

termasuk bangsa Indonesia. Dalam hal ini pendidikan nasional bertugas untuk mencetak manusia Indonesia yang memiliki karakteristik ke-Indonesiaan sebagaimana termaktub dalam tujuan pendidikan nasional pada Bab II pasal 3 UUSPN tahun 2003. Dari proses pendidikan yang mengacu kepada UUSPN tersebut di atas diharapkan akan menghasilkan lulusan yang memiliki karakteristik berpegang teguh kepada prinsip-prinsip keadilan, egalitas, toleransi, moderat, berkeprimanusiaan, demokrat, keseimbangan, dan memiliki rasa solidaritas sosial yang tinggi. Dengan demikian akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang berkeadaban (masyarakat madani), yakni tatanan kehidupan yang dinamis-konstruktif yang mengedepankan partisipasi aktif dan aspirasi masyarakat dalam proses-proses sosial dan pembangunan, tegaknya hukum, terbuka atas perbedaan dan keragaman yang ada, bertanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam masyarakat.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian skripsi ini memerlukan sejumlah data teoretis berkaitan dengan implementasi tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum pada UUSPN Tahun 2003 dan teoritis tentang masyarakat madani. Karena itu langkah-langkah penelitian dalam pembuatan skripsi ini adalah :

1. Mengumpulkan data berupa buku-buku dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian penulis,
2. Menginventarisasi buku-buku yang berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional dan masyarakat madani,
3. Melakukan analisis terhadap peran tujuan pendidikan dalam pembentukan masyarakat madani.